



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 304 /MPP/Kep/4/2001**

TENTANG

**PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN
UNTUK PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 365/MPP/Kep/12/2001 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan;
- b. bahwa Harga Patokan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan tersebut huruf a, masa berlakunya telah berakhir sejak tanggal 6 April 2002;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian dalam perhitungan Pungutan Hasil Perikanan, perlu menetapkan Harga Patokan Ikan, dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4059);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/SK/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 57/MPP/Kep/1/2002;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

Memperhatikan : Hasil rapat interdep bersama Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo), Himpunan Pengusaha Perikanan Indonesia (HPPI), Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN), Asosiasi Pengusaha Non Tuna dan Non Udang Indonesia (ASPINTU), dan Perum Perikanan Samudera Besar, tanggal 8 Maret 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN.**

Pasal 1

Harga Patokan Ikan atau HPI adalah besaran nilai atau harga ikan dalam rupiah untuk perhitungan Pungutan Hasil Perikanan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan informasi harga ikan di pasar dalam negeri dan di pasar internasional yang ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta masukan lainnya dari asosiasi/pelaku usaha terkait di bidang perikanan.

Pasal 2

- (1) Harga ikan di pasar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan harga rata-rata per jenis ikan di Tempat Pendaratan Ikan utama di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (2) Harga ikan di pasar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan harga rata-rata FOB per jenis ikan untuk ekspor.
- (3) Persentase volume penjualan hasil ikan di pasar dalam negeri dan persentase volume penjualan hasil ikan untuk ekspor ditentukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan angka volume penjualan hasil ikan yang dijual di pasar dalam negeri dan volume penjualan hasil ikan yang dijual untuk ekspor.
- (4) HPI ditetapkan berdasarkan rumus: -

$$\text{HPI} = ax + by$$
, dimana:
 - a** adalah persentase volume penjualan ikan di pasar dalam negeri;
 - b** adalah persentase volume penjualan ikan untuk ekspor;

- x** adalah harga rata-rata tertimbang per jenis ikan di pasar dalam negeri;
- y** adalah harga rata-rata tertimbang FOB per jenis ikan untuk ekspor.

Pasal 3

- (1) HPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Keputusan ini.
- (2) Dalam hal masa berlaku HPI telah habis berdasarkan Keputusan ini, akan tetapi belum ditetapkan HPI yang baru, maka HPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipergunakan untuk menghitung Pungutan Hasil Perikanan, sampai dengan ditetapkannya HPI yang baru.

Pasal 4

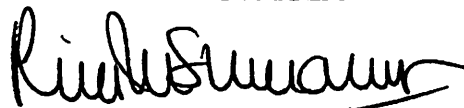
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 365/MPP/Kep/12/2001 tentang penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 April 2002.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 11 April 2002

h **MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PEDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



RINI M. S. SOEWANDI

1. The first of the three main points of the report is that the Commission has found that the Government of the United Kingdom has failed to comply with its obligations under the European Convention on Human Rights in relation to the treatment of persons in custody.

2. The second point is that the Commission has found that the Government of the United Kingdom has failed to provide adequate information to the Commission regarding the treatment of persons in custody.

3. The third point is that the Commission has found that the Government of the United Kingdom has failed to take adequate steps to prevent and punish human rights violations in the future.

4. The Commission has also found that the Government of the United Kingdom has failed to provide adequate information to the Commission regarding the treatment of persons in custody. This is a serious breach of the Convention and the Commission has urged the Government to provide the information immediately.

5. The Commission has also found that the Government of the United Kingdom has failed to take adequate steps to prevent and punish human rights violations in the future.

6. The Commission has also found that the Government of the United Kingdom has failed to provide adequate information to the Commission regarding the treatment of persons in custody. This is a serious breach of the Convention and the Commission has urged the Government to provide the information immediately.

7. The Commission has also found that the Government of the United Kingdom has failed to take adequate steps to prevent and punish human rights violations in the future.

8. The Commission has also found that the Government of the United Kingdom has failed to provide adequate information to the Commission regarding the treatment of persons in custody. This is a serious breach of the Convention and the Commission has urged the Government to provide the information immediately.

9. The Commission has also found that the Government of the United Kingdom has failed to take adequate steps to prevent and punish human rights violations in the future.

10. The Commission has also found that the Government of the United Kingdom has failed to provide adequate information to the Commission regarding the treatment of persons in custody. This is a serious breach of the Convention and the Commission has urged the Government to provide the information immediately.

11. The Commission has also found that the Government of the United Kingdom has failed to take adequate steps to prevent and punish human rights violations in the future.

12. The Commission has also found that the Government of the United Kingdom has failed to provide adequate information to the Commission regarding the treatment of persons in custody. This is a serious breach of the Convention and the Commission has urged the Government to provide the information immediately.

**PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN (HPI) UNTUK
PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP)**

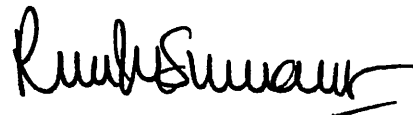
No.	N a m a I k a n			HPI (Rp/Kg)
	Lokal	cara pengawetan	Inggris	
	Pelagis Besar			
1	Tuna Mata Besar		Bigeye tuna	<i>Thunnus abesus</i> 10,544
2	Madidihang		Yellowfin tuna	<i>Thunnus albacares</i> 10,544
3	Albacore		Albacora	<i>Thunnus alalunga</i> 10,544
4	Tuna lain-lain		-	<i>Thunnus Sp</i> 7,852
5	Cakalang		Skipjack tuna, Striped tuna	<i>Katsuwonus pelamis</i> 3,010
6	Tongkol		Frigate mackerel	<i>Auxis thazard</i> 2,465
7	Tenggiri Bulat		Strike Spanish mackerel	<i>Scomberomorus lineatus</i> 7,852
8	Tenggiri Papan		Spotted Spanish mackerel	<i>Scomberomorus guttatus</i> 7,852
	Pelagis Kecil			
9	Layang	es	Layang scad	<i>Decapterus macrosoma</i> 2,000
		garam		700
10	Kembung	es	Striped mackerel	<i>Restrelliger brachysoma</i> 2,000
		garam		700
11	Selar	es	Yellowstripe trevally	<i>Selaroides leptolepis</i> 1,683
		garam		1,122
12	Lemuru	es	Indonesia oil sardine	<i>Sardinella longiceps</i> 574
		garam		275
13	Tembang	es	Fringescale sardine	<i>Sardinella fimbriata</i> 400
		garam		200
14	Alu-alu	es	Obtuse barracuda	<i>Sphyræna abtusata</i> 7,291
		garam		5,608
	Layang		Layang scad	<i>Decapterus macrosoma</i> 2,500
	Kembung		Striped mackerel	<i>Restrelliger brachysoma</i> 2,000
	Selar		Yellowstripe trevally	<i>Selaroides leptolepis</i> 1,000
	Lemuru		Indonesia oil sardine	<i>Sardinella longiceps</i> 500
	Tembang		Fringescale sardine	<i>Sardinella fimbriata</i> 500
	Alu-alu		Obtuse barracuda	<i>Sphyræna abtusata</i> 5,000
	Demersal			
15	Kuwe		Great trevally, Dusky jack	<i>Caranx sexfasciatus</i> 4,111
16	Layur		Hairtail	<i>Trichiurus savala</i> 2,975
17	Bawal Putih		White pomfret	<i>Pampus argenteus</i> 12,333
18	Bawal Hitam		Black pomfret	<i>Formio niger</i> 9,250
19	Kambing-kambing		-	- 3,083
20	Gulama		Silver pennah croaker	<i>Pennahia argentata</i> 3,083
21	Samge		Reeve's croaker	<i>Chrysochir areus</i> 3,083
22	Ayam-ayam		-	- 3,083
23	Kuro/Senangin		Fourfinger threadfin	<i>Eleutheroema tetradactylum</i> 2,569
24	Kakap Merah		Red Snapper	<i>Lutjanus altifrontalis</i> 10,278
25	Ikan Sebelah		Indian halibut	<i>Psettodes erumei</i> 4,111
26	Ikan Beloso		Greater lizardfish	<i>Saurida tumbil</i> 1,542
27	Pari		Short-tailed butterfly ray	<i>Gymnara sp</i> 1,542

Lampiran : Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan
Nomor : 304 /MPP/Kep/4/2002

28	Kurisi	Threadfin bream	<i>Nemipterus nematophorus</i>	3,083
29	Talang-talang	Deep leatherskin	<i>Chorinemus tala</i>	3,083
30	Bilis	-	-	1,542
31	Manyung	Giant catfish	<i>Arius thalassinus</i>	3,083
32	Cumi-cumi/Sotong	Squid	<i>Loligo sp</i>	8,222
33	Kerapu	Grouper	<i>Epinephelus sp</i>	10,278
34	Ikan Lain-lain	-	-	2,058
UDANG				
35	Udang Windu	Tiger Shrimp	<i>Penaeus monodon</i>	60,000
36	Udang Putih	Banana Shrimp	<i>Penaeus merguensis</i>	50,000
37	Udang Lain-lain	-	<i>Penaeus spp</i>	15,610
38	Tangk. Sampingan	-	-	

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 11 April 2002

**Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Republik Indonesia**



RINI M.S. SOEWANDI